

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR) merupakan sebuah organisasi hak asasi manusia internasional yang bersifat non-profit dan non-pemerintah yang dikhususkan untuk menghapuskan diskriminasi dan rasisme, menempa solidaritas internasional di antara kelompok minoritas yang terdiskriminasi dan memajukan sistem hak asasi manusia internasional. Organisasi ini didirikan pada tahun 1988 oleh Buraku Liberation League (BLL), yang merupakan sebuah gerakan pembebasan kelompok minoritas terbesar di Jepang, yakni masyarakat Buraku.¹ Masyarakat Buraku merupakan kelompok minoritas yang terbentuk atas dasar kasta dalam etnis Jepang. Buraku pada umumnya dianggap sebagai keturunan dari penduduk buangan yang ada pada periode Feudal Tokugawa (1603–1867).²

IMADR diakui sebagai *Non Governmental Organizations* (NGOs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1993.³ Sejak pengakuannya sebagai NGO resmi, IMADR bekerja di bawah status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sejak tahun 2007.⁴ Status tersebut memungkinkan IMADR untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, termasuk sesi reguler

¹ The International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism, "About IMADR", <http://imadr.org/about/>, (diakses pada 28 Agustus 2017).

² "Buraku Discrimination", <http://www.imadr.org/sayama/buraku.html>, (diakses pada 28 Agustus 2017).

³ Flavia Cangià, *Performing the Buraku: Narratives on Cultures and Everyday Life in Contemporary Japan*, (Zürich: LIT Verlag, 2013), 109.

⁴ United Nations Department of Economic and Social Affairs, "NGO Branch", <http://esango.un.org/civilsociety/showProfileDetail.do?method=showProfileDetails&profileCode=1046>, (diakses pada 9 Februari 2018).

dengan badan-badan fungsional PBB serta ikut serta dalam proses penyusunan standar atas isu tertentu dalam PBB dengan cara mengajukan pernyataan lisan maupun tertulis, bertemu dengan perwakilan resmi pemerintah maupun NGO lain, menyelenggarakan dan menghadiri acara paralel yang diadakan selama sesi berlangsung, sekaligus berpartisipasi dalam debat, dialog interaktif, diskusi panel maupun pertemuan non-formal.⁵

Penetapan IMADR sebagai organisasi nonpemerintah internasional secara bersamaan memperkuat aktivitas organisasi ini pada level internasional. IMADR membentuk sebuah jaringan global dengan tujuan untuk mengurangi batasan-batasan antara kelompok masyarakat seperti Buraku dengan kelompok minoritas yang berada di negara lain, salah satunya adalah masyarakat Dalit di India.⁶ “Dalit” merupakan sebuah istilah identifikasi diri yang berarti hancur atau rusak dalam Bahasa Marathi (bahasa daerah India Barat Daya), mengacu kepada orang-orang yang berada pada tingkatan paling bawah dalam hirarki sosial India.⁷

Dalam World Conference Against Racism (WCAR) yang dilaksanakan di Durban, Afrika Selatan pada tahun 2001, IMADR bersama dengan masyarakat Dalit dan Buraku bekerjasama untuk menuntut dicantumkannya istilah *descent*⁸ dalam Deklarasi Durban untuk diadopsi pada akhir konferensi. Walaupun usaha tersebut ternyata gagal untuk diwujudkan pada waktu itu, rekomendasi untuk menginterpretasikan istilah *descent* berhasil diterima dan diadopsi oleh

⁵ United Nations, “Working with ECOSOC: An NGO Guide to Consultative Status”, <http://csonet.org/content/documents/Brochure.pdf>, (diakses pada 29 Agustus 2017).

⁶ *Ibid.*

⁷ Annapurna Waughray, “Caste Discrimination and Minority Rights: the Case of India’s Dalits”, *International Journal on Minority and Group Rights* 17 (2010): 327, <http://www.aogaku-daku.org/wp-content/uploads/2014/11/casteIDENTITY.pdf>, (diakses pada 29 Agustus 2017).

⁸ Sebuah istilah yang menunjukkan diskriminasi terhadap anggota masyarakat berdasarkan bentuk strata sosial seperti kasta dan sistem status warisan yang meniadakan atau mengganggu kesempatan untuk memperoleh hak asasi manusia.

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) untuk dicantumkan dalam Artikel 1 International Convention on the Elimination of Racial Discrimination (ICERD) sebagai hasil dari WCAR.⁹

Keterlibatan IMADR dalam permasalahan tersebut di atas berlanjut hingga tahun 2004 dimana organisasi ini berkerjasama dengan The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), International Dalit Solidarity Network (IDSN) serta Lutheran World Federation untuk menyusun sebuah konsultasi informal yang dinamakan sebagai *The UN Draft Principles and Guidelines for the Effective Elimination of Discrimination based on Work and Descent*.¹⁰ Laporan tersebut kemudian diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 26 April 2007. Sebagai hasil dari upaya yang dilakukan secara bersama ini, pada Maret 2009, PBB akhirnya mengakui keberadaan Discrimination based Work and Descent (DWD)¹¹ sebagai sebuah permasalahan yang harus diselesaikan pada level internasional dan mulai mengerahkan seperangkat standar dan prinsip yang ditujukan untuk menyusun resolusi untuk permasalahan ini.¹²

Upaya yang dilakukan IMADR untuk ikut andil dalam diskursus mengenai diskriminasi kasta terhadap masyarakat Dalit tidak berhenti pada tahap ini, melainkan meluas kepada permasalahan diskriminasi interseksi yang mencakup kasta dan gender yang dialami oleh perempuan Dalit di India. Perempuan Dalit

⁹ IMADR, “Dalit met Buraku–Discrimination Based on Work and Descent, (diakses pada 28 Agustus 2017).

¹⁰ The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Human Rights Bodies and Mechanism”, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session_11/A-HRC-11-CRP3.pdf, (diakses pada 7 September 2017).

¹¹ Merupakan istilah yang digunakan PBB untuk menyebut diskriminasi kasta.

¹² Flavia Cangià, *Performing the Buraku: Narratives on Cultures and Everyday Life in Contemporary Japan*, (Zürich: LIT Verlag, 2013), 109.

mengalami diskriminasi yang bersumber dari ketidaksetaraan gender dan diskriminasi kasta. Oleh karenanya, sebagai bagian dari kasta rendah sekaligus kelompok minoritas di India, perempuan Dalit menghadapi permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan perempuan non-Dalit maupun masyarakat India pada umumnya. Secara lebih spesifik, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan Dalit, diantaranya adalah kerugian ekonomi, kerugian pendidikan, angka kesehatan yang buruk, diskriminasi atas dasar kasta dalam mengakses sumber penghidupan, layanan publik dan partisipasi politik, kekerasan berbasis kasta, prostitusi kuil (eksploitasi seksual atas nama agama) dan diskriminasi gender.¹³

Sebagai kelompok yang mengalami diskriminasi kasta dan gender secara bersamaan, perempuan Dalit tidak tinggal diam untuk menyikapi permasalahan yang mereka hadapi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengangkat permasalahan ini ke ranah publik yang lebih luas baik pada level domestik maupun internasional melalui berbagai media, seperti karya literatur, kampanye, surat kabar, maupun advokasi yang dilakukan oleh organisasi yang mereka bentuk. Melalui karya literatur, seorang penulis feminis Dalit, Bama Fasutina menulis buku yang berjudul *Sangati*¹⁴ pada tahun 1994 yang bertujuan untuk menggambarkan bahwa disamping mengalami tekanan dari pemerintah, sistem patriarki, kasta dan agama, perempuan Dalit di sisi lain menemukan keberanian

¹³ Nindhi Sadana Sabharwal dan Wandana Sonalkar, "Dalit Women in India: At the Crossroads of Gender, Class, and Caste", <http://www.theglobaljusticenetwork.org/global2441/index.php/gjn/article/download/54/85>, (diakses pada 28 Agustus 2017).

¹⁴ *Sangati* merupakan serangkaian anekdot yang saling terhubung mengenai komunitas perempuan *Paraiya* dan mengenai perjuangan yang dirasakan secara bersama.

untuk menantang keberadaan dominasi *power* yang menjadi penyebab utama dari diskriminasi yang mereka alami.¹⁵

Selain itu, perempuan Dalit juga menuliskan cerita mereka melalui *Khabar Lahariya* atau “News Waves” yang merupakan surat kabar India pertama yang ditulis dan dijalankan oleh masyarakat Dalit.¹⁶ Melalui media ini, perempuan Dalit memiliki sebuah forum tersendiri untuk menuliskan cerita mereka tanpa adanya pembatasan sebagaimana yang terjadi dalam media *mainstream* India. Di samping melalui media, perempuan Dalit juga terlibat dalam gerakan sosial. Transformasi keterlibatan perempuan Dalit dalam perpolitikan India dimulai pada akhir 1980an saat didirikannya The National Federation on Dalit Women (NFDW) sebagai respon dari kurangnya ruang untuk mengartikulasikan kepentingan perempuan Dalit dalam gerakan Dalit secara umum maupun gerakan feminis di India.¹⁷ Dalam forum *UN Twelfth Session of the Working Group on Minority* yang dilangsungkan pada 8 Agustus 2006 di Jenewa, Ezhil Vandana, sebagai representatif NFDW menyampaikan pernyataan mengenai kondisi dan situasi yang dialami oleh perempuan Dalit.¹⁸

Dalit women are victims of caste and gender violence, used by landlords, middlemen, contractors and policemen to “inflict” political lessons and crush protest, struggle and dissent. Dalit women are raped before being massacred and used as hostages to punish absconding male members in the family. Dalit women being “the downtrodden among the downtrodden”, have been denied

¹⁵ K.A. Geetha dalam Shalini Yadav “Unheard Voices and Gender Construction of Dalit Women in Bama Faustina’s Sangati”, *International Journal of English and Literature (IJEL)*, Vol. 7, Issue 2, April 2017, <https://archive.org/details/2.IJELAPR20172>, (diakses pada 18 Oktober 2017).

¹⁶ Mark Magnier, “Dalit women find their voice through a newspaper”, <http://articles.latimes.com/2009/oct/25/world/fg-india-caste25>, (diakses pada 13 Oktober 2017).

¹⁷ Ruth Manorama, “Background information on Dalit women in India”, http://www.rightlivelihodaward.org/fileadmin/Files/PDF/Literature_Recipients/Manorama/Background_Manorama.pdf, (diakses pada 2 Oktober 2017).

¹⁸ OHCHR, “A Statement made to the Working Group on Minority on the 8th of August 2006 at the UN, Geneva”, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/WG/12/National_Federation_of_Dalit_Woman_India.pdf, (diakses pada 23 Oktober 2017).

for centuries a space for utterance. Dalit women lag behind with respect to a number of development indicators.

Melalui keterlibatan dalam forum tersebut, NFDW berusaha untuk meningkatkan perhatian serta kesadaran dari masyarakat internasional mengenai kondisi sosial perempuan Dalit. Selain itu, Vandana juga mengajukan rekomendasi agar Badan-Badan Kemanusiaan PBB mengambil langkah untuk mengangkat isu diskriminasi berbasis kasta dan *descent* melalui kerjasama dengan pemerintah India dan mendorong diberlakukannya dan diterapkannya undang-undang nasional maupun perjanjian internasional yang sebelumnya sudah diratifikasi oleh pemerintah India. Berdasarkan pemahaman akan situasi dan kondisi yang mereka alami, saat ini gerakan perempuan Dalit berfokus pada permasalahan akses terhadap sumber mata pencaharian dan kebutuhan sosial, patriarki, diskriminasi atas dasar kasta dan impunitas bagi kejahatan terhadap perempuan Dalit.¹⁹

Permasalahan diskriminasi kasta dan gender terhadap perempuan Dalit di India tidak berlangsung begitu saja tanpa adanya upaya pencegahan dari pemerintah India sendiri. Sejak era kemerdekaan India pada tahun 1947, pemerintah telah melarang adanya praktik diskriminasi kasta. Pemerintah India mengesahkan undang-undang yang ditujukan untuk menghapuskan praktek diskriminatif terhadap *Scheduled Castes*, serta memastikan pemberdayaan sosial dan ekonomi mereka, diantaranya melalui pengesahan The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act (POA) 1989²⁰ yang melarang kejahatan yang didasarkan atas gender dan kasta, seperti penyerangan atau penggunaan kekerasan dengan maksud untuk mencemarkan nama baik dan

¹⁹ Nindhi Sadana Sabharwal dan Wandana Sonalkar, "Dalit Women in India: At the Crossroads of Gender, Class, and Caste", <http://www.theglobaljusticenetwork.org/global2441/index.php/gjn/article/download/54/85>, (diakses pada 28 Agustus 2017).

²⁰ *Ibid.*

menghina martabat serta eksploitasi seksual terhadap perempuan *Scheduled Castes*, dan penerapan The National Policy for the Empowerment of Women Tahun 2001 yang mengakui bahwa penyebab mendasar dari adanya ketidaksetaraan gender berhubungan dengan struktur sosial dan ekonomi. Kebijakan ini juga menyatakan bahwa bagi kelompok perempuan rentan, termasuk perempuan Dalit, akses terhadap pendidikan, kesehatan dan sumber daya produktif masih belum memadai.²¹

Pada level internasional, India merupakan penandatanganan International Convention of All Forms of Discrimination against Women (ICEDAW) dan ICERD. Namun, keberlangsungan praktek-praktek yang diasosiasikan dengan diskriminasi serta perlakuan tidak baik atas dasar kasta dan gender menunjukkan kurang berjalannya upaya untuk memenuhi jaminan dan janji yang dibuat oleh Pemerintah India secara internasional maupun konstitusional terhadap perempuan Dalit. Walaupun perempuan Dalit telah melakukan berbagai upaya untuk menyuarakan permasalahan diskriminasi kasta dan gender ke ruang publik sejak beberapa dekade lalu, diskriminasi, kekerasan maupun kerugian yang dialami oleh perempuan Dalit yang bersumber dari diskriminasi kasta dan gender masih terus berlangsung hingga saat ini.

Berkaitan dengan hal yang disebutkan di atas, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kurang efektifnya penyelesaian permasalahan diskriminasi kasta dan gender terhadap perempuan Dalit. Pertama, penerapan undang-undang dan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah India mengenai permasalahan

²¹ National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR), “*Joint Stakeholders’ Report on Caste Based Discrimination in India: 27th Session of the Universal Periodic Review of the UN Human Rights Council – India (III UPR Cycle- May 2017)*”, http://ncdhr.org.in/publications/UPR_Caste_Based_Discrimination,_India_2012.pdf/view, (diakses pada 5 Februari 2018).

perempuan Dalit masih belum sempurna. Meskipun pemerintah telah mengakui diperlukan penanganan diskriminasi kasta dan gender secara lebih lanjut, kebijakan nasional mengenai perempuan Dalit hanya berfokus semata-mata pada bidang kesetaraan pendidikan, belum mencakup sektor lain. Selain itu, perencanaan dan *budget* gender di India lebih difokuskan pada perempuan secara keseluruhan, dimana perencanaan untuk perempuan Dalit tidak wajib dilakukan.²²

Faktor selanjutnya yang menyebabkan upaya penyelesaian permasalahan perempuan Dalit belum sempurna adalah kuatnya kontrol pemerintah India dalam menentukan aktor domestik mana yang diizinkan untuk mendapatkan akses terhadap jaringan dan pendanaan asing.²³ Sebuah undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah India pada tahun 2010 bernama Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) yang disusun untuk mengatur pendanaan asing terhadap organisasi nonpemerintah dipandang telah gagal dikarenakan ketidakselarasan peraturan ini dengan hukum, prinsip dan standar internasional.²⁴ Sejak tahun 2014, pemerintah India telah menggunakan peraturan ini untuk menekan, mengintimidasi dan memberhentikan pendanaan asing terhadap organisasi nonpemerintah yang mengkritik tindakan dan kebijakan pemerintah.²⁵ Organisasi dan gerakan yang dijalankan oleh kelompok minoritas seperti Dalit dan Muslim menjadi pihak yang merasakan dampak atas tindakan tersebut, dikarenakan kehadirannya dipandang membawa gesekan di tengah masyarakat dan pemerintah sendiri. Terbatasnya

²² *Ibid*, 14.

²³ Rita Jalali, International Funding of NGOs in India: Bringing the State Back In, <http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=97bac5d4-0da2-4af1-b312-f19e20fc0618%40sessionmgr4009>, (diakses pada Oktober 2017).

²⁴ IDSN, "UN Special Rapporteur criticises India's FCRA", <https://idsn.org/un-special-rapporteur-criticises-indias-fcra/>, (Diakses pada 5 Februari 2018).

²⁵ Human Rights Watch, "India: Key UN Rights Recommendations Ignored", <https://www.hrw.org/news/2017/09/21/india-key-un-rights-recommendations-ignored>, (diakses pada 5 Februari 2018).

donor internasional menjadi hambatan tersendiri bagi organisasi Dalit untuk melakukan aktivitas serta menyuarakan kepentingan mereka.

Selain kedua faktor di atas, alasan lain yang melatarbelakangi rumitnya penyelesaian isu ini adalah minimnya kepatuhan India terhadap norma HAM internasional. Sebuah laporan yang didasarkan pada analisis Indian Penal Code atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) India menjelaskan bagaimana Hukum Pidana India digunakan untuk membatasi dan menekan kebebasan berbicara di India, khususnya untuk membatasi aktivitas wartawan dan organisasi nonpemerintah yang memiliki agenda yang berbeda dengan yang dimiliki oleh pemerintah.²⁶ Hukum ini merupakan tantangan yang besar bagi aktivis pembela hak-hak minoritas seperti suku dan agama serta diskriminasi berdasarkan kasta, khususnya aktivis Dalit. Aktivis pembela HAM tidak diakui dan dilindungi oleh negara, melainkan dipandang sebagai kriminal, agen-agen asing, anti nasionalis, teroris, serta dicap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional.²⁷

Perempuan Dalit telah melewati upaya yang panjang untuk mengangkat isu diskriminasi kasta dan gender ke ranah internasional sejak tahun 1980-an. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mencantumkan istilah diskriminasi kasta dalam mandat ICERD. Namun, permasalahan diskriminasi kasta dan gender terhadap perempuan Dalit masih terus berlangsung hingga detik ini. Disamping faktor-faktor yang disebutkan di atas, terdapat sejarah panjang mengenai upaya pemerintah India untuk menunda dipertimbangkannya isu diskriminasi kasta pada WCAR pada tahun 2001, dengan alasan bahwa permasalahan kasta adalah bagian

²⁶ Human Rights Watch, "India: Stop Treating Critics As Criminals", <https://www.hrw.org/news/2016/05/24/india-stop-treating-critics-criminals>, (diakses pada 5 Februari 2018).

²⁷ International Dalits Solidarity Network, "Amnesty International: Dalit Human Rights Defenders Face Serious Risk", <http://idsn.org/amnesty-international-dalit-human-rights-defenders-face-serious-risk/>, (diakses pada 5 Februari 2018).

dari tradisi.²⁸ Walaupun pada perkembangannya pemerintah India sudah mulai menandai dan menyusun aturan-aturan serta meratifikasi perjanjian internasional dalam rangka melindungi hak-hak perempuan Dalit, namun pada penerapannya undang-undang maupun hukum yang ditetapkan pemerintah berbanding terbalik dengan upaya tersebut. Terlebih lagi, hukum yang ada malah dijadikan sebagai cara untuk menekan hak-hak sipil perempuan dan masyarakat Dalit secara keseluruhan.

Oleh karenanya, diperlukan upaya yang lebih efektif untuk mendorong proses penerapan hukum yang jelas dan adil terhadap perempuan Dalit di India serta memastikan hak-hak mereka sebagai warga negara. Dalam hal ini, peranan PBB sebagai rezim internasional terkuat di dunia sangat dibutuhkan untuk mendisiplinkan India agar bertindak sesuai dengan standar serta norma internasional mengingat negara ini merupakan penandatanganan dari berbagai perjanjian HAM internasional. Akan tetapi, permasalahan diskriminasi kasta dan gender masih merupakan hal baru dalam kerangka kerja PBB. Dibutuhkan keterlibatan, peranan serta upaya dari berbagai organisasi nonpemerintah lokal dan global untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya isu ini di PBB.

Sebagai organisasi nonpemerintah resmi, IMADR telah memiliki jejak kontribusi yang baik dalam menyuarakan permasalahan kelompok minoritas khususnya yang berkaitan dengan kasta. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis upaya lebih lanjut yang dilakukan oleh IMADR untuk menyuarakan isu diskriminasi yang lebih kompleks, khususnya diskriminasi kasta dan gender yang dialami oleh perempuan Dalit India di PBB. Menyuarakan dapat

²⁸ Clifford Bob, “‘Dalit Rights are Human Rights:’ Caste Discrimination, International Activism, and the Construction of a New Human Rights Issue”, http://www.jstor.org/stable/20072792?seq=24#page_scan_tab_contents, (diakses pada 27 September 2017).

didefinisikan sebagai; mewakili untuk mengemukakan sesuatu; turut menentukan sesuatu (dalam pemerintahan); mengemukakan pendapat.²⁹ Meyuarakan di sini memiliki artian bahwa IMADR mewakili untuk mengemukakan isu diskriminasi kasta dan gender terhadap perempuan Dalit India serta turut andil dalam menentukan standar HAM internasional yang berkaitan dengan permasalahan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Diskriminasi kasta dan gender yang terjadi kepada perempuan Dalit di India masih terus berlangsung hingga saat ini. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, yakni kurang sempurnanya penerapan undang-undang yang ditujukan untuk melindungi perempuan Dalit, kuatnya kontrol pemerintah untuk membatasi upaya penegakan HAM, serta kurang patuhnya India terhadap norma serta standar HAM internasional. Sebuah isu domestik akan menjadi perhatian internasional ketika negara tidak mampu lagi untuk melindungi hak-hak sipil warganegaranya. Pada kasus ini, India belum melakukan tindakan yang signifikan untuk menangani permasalahan diskriminasi kasta dan gender. Diperlukan upaya yang lebih efektif untuk mendorong diberlakukannya hukum yang adil terhadap perempuan Dalit.

Oleh karenanya, dorongan dari masyarakat internasional, khususnya PBB, sebagai rezim internasional terbesar yang memayungi negara-negara di dunia, diperlukan untuk mendisiplinkan India dalam menerapkan hukum dan undang-undang sangat diperlukan. Penting untuk melihat bagaimana IMADR sebagai organisasi nonpemerintah internasional yang berfokus pada penyelesaian permasalahan kelompok minoritas, menyuarakan isu diskriminasi kasta dan

²⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Menyuarakan", <https://www.kbbi.web.id/suara>, (diakses pada 14 Februari 2018).

gender yang dialami perempuan Dalit India di ranah diskursus PBB disamping tantangan-tantangan yang dihadapi kelompok ini pada level domestik serta barunya isu ini dalam kerangka kerja PBB. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana upaya IMADR dalam menyuarakan isu diskriminasi interseksi yang terjadi pada perempuan Dalit India di PBB.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang ingin dijawab oleh peneliti adalah:

Bagaimana upaya IMADR dalam menyuarakan isu diskriminasi gender dan kasta yang dialami oleh perempuan Dalit India di PBB?

1.4 Tujuan Penelitian

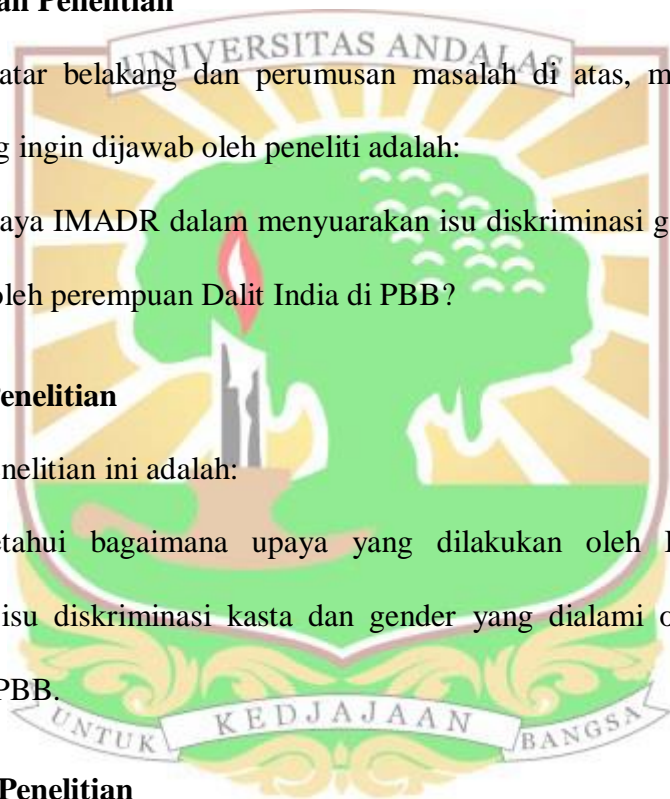
Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh IMADR dalam menyuarakan isu diskriminasi kasta dan gender yang dialami oleh perempuan Dalit India di PBB.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menambah kepustakaan dalam kajian dalam Ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang berkaitan dengan upaya dan peranan organisasi nonpemerintah internasional dalam menyuarakan permasalahan kelompok minoritas.



- 2) Sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya terkait permasalahan yang sama.

1.6 Studi Pustaka

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis mengenai upaya yang dilakukan oleh IMADR dalam menyuarakan isu diskriminasi kasta dan gender terhadap perempuan Dalit India di PBB. Oleh karenanya, untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti merujuk kepada beberapa penelitian yang relevan serta berkaitan dengan topik yang peneliti angkat. Dengan mengkaji berbagai studi pustaka, peneliti bertujuan untuk menganalisis perbedaan maupun persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga peneliti mampu untuk memperkaya penelitian peneliti serta menjawab pertanyaan penelitian dari sudut pandang yang berbeda.

Sebuah penelitian yang ditulis oleh Nidhi Sadana Sabharwal dan Wandana Sonalkar pada tahun 2015 dengan judul *Dalit Women in India: At the Crossroads of Gender, Class and Caste* menjadi studi pustaka utama yang peneliti gunakan untuk memahami dengan jelas mengenai kondisi ekonomi, politik dan sosial perempuan Dalit. Pada penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *Global Justice: Theory Practice Rhetoric* ini, Sabharwal dan Wandana menyediakan informasi mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan Dalit sebagai bagian dari kelompok kasta terendah di India yang juga dikenal dengan golongan *untouchable* atau paria. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai

kesenjangan ekonomi dan sosial antara perempuan Dalit dengan laki-laki Dalit maupun perempuan non-Dalit.³⁰

Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh National Sample Survey Organisation (NSSO), the Cencus of India, the National Crime Records Bureau, the National Family Health Survey-2 dan 3 serta survey primer yang dirangkum dalam penelitian ini, didapatkan hasil bahwa terdapat perbaikan yang sangat lambat menurut indikator pembangunan manusia bagi perempuan Dalit dibandingkan dengan masyarakat India secara keseluruhan. Walaupun perempuan non-Dalit mengalami permasalahan yang berhubungan dengan eksploitasi gender dalam lapangan pekerjaan dan kerugian ekonomi sebagaimana yang juga dialami oleh perempuan kasta rendah, bagi perempuan Dalit permasalahan ini juga disertai dengan diskriminasi atas dasar kasta. Pada akhirnya, penelitian ini melihat bahwa reformasi pada level kebijakan merupakan solusi utama yang tersedia untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perempuan Dalit.³¹

Clifford Bob dalam tulisannya yang berjudul “*Dalit Rights are Human Rights*”: *Caste Discrimination, International Activism, and the Construction of a New Human Rights Issue* menyajikan analisis dari sudut pandang yang berbeda terkait permasalahan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat Dalit. Melalui tulisan yang dimuat dalam jurnal *Human Rights Quarterly* pada tahun 2007 ini, Bob menganalisis upaya yang dilakukan oleh aktivis Dalit untuk mengangkat permasalahan diskriminasi kasta sebagai isu hak asasi manusia dalam komunitas internasional. Melalui tulisan ini, peneliti memperoleh gambaran yang lebih jelas

³⁰ Nindhi Sadana Sabharwal dan Wandana Sonalkar, “Dalit Women in India: At the Crossroads of Gender, Class, and Caste”, <http://www.theglobaljusticenetwork.org/global2441/index.php/gjn/article/download/54/85>, (diakses pada 28 Agustus 2017).

³¹ *Ibid.*

mengenai faktor-faktor yang menghalangi masyarakat Dalit untuk membuat klaim atas hak-hak mereka, diantaranya adalah lemahnya aturan diantara kelompok Dalit dan kurangnya istilah hak asasi manusia untuk menjelaskan diskriminasi atas dasar kasta, termasuk di dalam *Universal Declaration of Human Rights*.³²

Bob menyediakan kajian mengenai perubahan serta perkembangan dalam komunitas aktivis Dalit, diantaranya pembentukan jaringan Dalit secara nasional maupun internasional dan pembentukan retorika yang lebih terfokus pada kesalahan aturan negara yang menyebabkan diskriminasi kasta. Selain itu, tulisan ini juga menganalisis mengenai peranan dari berbagai aktor dalam permasalahan ini, seperti badan-badan PBB, organisasi nonpemerintah internasional, dan negara lain dalam upaya menjadikan diskriminasi kasta dalam agenda hak asasi manusia internasional. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini, Bob membahas implikasi dari adanya pengakuan permasalahan Dalit bagi teori-teori hak asasi manusia, politik internasional, dan yang terpenting upaya-upaya advokasi serupa yang terjadi kepada kelompok minoritas seperti masyarakat Buraku di Jepang dan beberapa kelompok di Afrika Barat dan Timur.³³

Sejalan dengan tulisan Bob, Suryakant Waghmore dalam penelitiannya yang berjudul *Beyond Depoliticization? Caste, NGOs and Dalit Land Rights in Maharashtra, India* juga membahas mengenai peranan dari aktor non negara dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Dalit, namun dalam ranah yang berbeda. Penelitian yang ditulis dalam jurnal *Development and Change* pada tahun 2012 ini mengangkat permasalahan mobilisasi masyarakat

³² Clifford Bob, "‘Dalit Rights are Human Rights:’ Caste Discrimination, International Activism, and the Construction of a New Human Rights Issue", *Human Rights Quarterly*, 2007, http://www.jstor.org/stable/20072792?seq=24#page_scan_tab_contents, (diakses pada 27 September 2017).

³³ *Ibid.*

Dalit dalam hal hak kepemilikan lahan dan pengembangan *gaairan* (lahan gembala) di India. Tulisan ini mengkaji bagaimana peran dan pengaruh organisasi non-pemerintah lokal dan internasional dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Dalit, khususnya dalam aspek pertanian. Waghmore merangkum berbagai konsep dan pendekatan dalam bentuk perdebatan untuk melihat peranan organisasi nonpemerintah dalam permasalahan masyarakat Dalit dari sudut pandang yang berbeda, seperti liberal, neo-liberal, neo-imperialis, dan lain sebagainya.³⁴

Dalam penelitian ini, Waghmore meng-*highlight* beberapa organisasi dan gerakan lokal yang fokus pada advokasi, pendanaan serta upaya penyelesaian permasalahan Dalit, yang terdiri dari Gerakan Akar Rumput Dalit, Manavi Hakk Abhiyan (MHA), Rural Development Centre (RDC) dan National Campaign on Dalit Human Rights, serta organisasi non pemerintah internasional seperti International Dalit Solidarity Network (IDSN) dan Intermon Oxfam (IO) yang masing-masing memiliki kerangka kerja yang berbeda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi non pemerintah, baik lokal maupun internasional memiliki rasionalisasi politik dan cara yang berbeda dengan pemerintah India dalam menangani permasalahan hak kepemilikan lahan dan *gaairan* masyarakat Dalit. Aktivitas yang dilakukan aktor non pemerintah merupakan aspek utama dalam tindakan sosial dan politik yang membawa kasta ke ranah politik yang lebih

³⁴ Suryakant Waghmore, "Beyond Depolitication? Caste, NGOs and Dalit Land Rights in Maharashtra, India", *Development and Change*, 2012, <http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=e7e0e8f7-a9ba-4618-8a15-39d0d713baf9%40sessionmgr120>, (diakses pada 22 September 2017).

luas dan merupakan proses awal untuk menantang dominasi *power* dari sistem kasta yang lebih tinggi di India.³⁵

Lain halnya dengan penelitian Waghmore yang memandang aktivis Dalit dari segi peranan dan upayanya, penelitian yang ditulis oleh Rita Jalali dengan judul *International Funding of NGOs in India: Bringing the State Back In* menganalisis aktivis Dalit dalam hubungannya dengan India sebagai sebuah negara bangsa. Melalui tulisan yang diterbitkan pada tahun 2008 oleh *International Society for Third-Sector Research and The John Hopkins University* ini, Jalali menjelaskan bagaimana India sebagai sebuah negara memainkan kontrol terhadap ikatan trans-nasional antara aktor-aktor luar negeri dan domestik dengan cara menerapkan praktek-praktek legislatif nasional yang menentukan distribusi pendanaan terhadap organisasi non pemerintah di India.³⁶

Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh pemahaman bahwa aktivitas masyarakat Dalit di bawah NGO menghadapi tantangan rumit yang berasal dari pihak pemerintah India sendiri. Penelitian ini mengemukakan mengenai adanya kesenjangan distribusi pendanaan antara NGO Dalit dengan NGO minoritas lain di India. Jalali menjelaskan dalam penelitian ini bahwa beberapa kelompok minoritas, khususnya Dalit dan Muslim memiliki posisi yang rentan di India dikarenakan sejarah hubungan tidak baik antara kelompok ini dengan kelompok mayoritas Hindu. Hal ini memudahkan India untuk menyatakan sebagian besar kegiatan yang dilakukan kelompok Dalit berorientasi politik dan dianggap

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Rita Jalali, "International Funding of NGOs in India: Bringing the State Back In", *International Society for Third-Sector Research and The John Hopkins University*, 2008, <http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=97bac5d4-0da2-4af1-b312-f19e20fc0618%40sessionmgr4009>, (diakses pada Oktober 2017).

mengganggu harmoni sosial. Pada akhirnya, sulit bagi aktivis Dalit untuk menerima pendanaan dari pemerintah yang membatasi pergerakan mereka.³⁷

Sebuah penelitian dari Emily Stanley dengan judul *Engendering Change? An Analysis of How NGOs Work on the Problem of Violence Against Women in South Africa* memberikan pengertian yang lebih mendalam mengenai kerangka kerja NGO dalam permasalahan perempuan dan gender. Penelitian yang ditulis pada tahun 2013 dalam *Journal of Politics and International Studies* ini bersandar pada pendapat Schuler yang berpendapat bahwa dalam kasus NGO yang beroperasi pada area yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, langkah yang diambil harus difokuskan kepada beberapa area, diantaranya: 1) kebutuhan korban; 2) nilai-nilai sosial yang membenarkan perilaku kekerasan terhadap perempuan; dan 3) sistem legal-sosial yang ditujukan untuk melindungi hak-hak pihak yang tidak bersalah dan menghukum pihak yang bersalah.³⁸

Berdasarkan premis-premis di atas, Stanley menjelaskan tiga area utama yang menjadi fokus kerangka kerja NGO yang bekerja di area perempuan, diantaranya adalah strategi lobi dan advokasi, peningkatan kesadaran akan isu kekerasan perempuan dan penyediaan layanan sosial bagi korban. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua kesimpulan utama yang muncul terkait dengan bagaimana NGO pada umumnya bekerja untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan secara khusus berusaha untuk mendorong keikutsertaan korban dalam strategi-strateginya. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa permasalahan ini tidak akan bisa

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Emily Stanley, "Engendering Change? An Analysis of How NGOs Work on the Problem of Violence Against Women in South Africa", *Journal of Politics & International Studies*, Vol. 8, Winter 2012/2013, <http://www.polis.leeds.ac.uk/assets/files/students/student-journal/ug-winter-12/130213-win-12-emily-stanley-8.pdf>, (diakses pada 28 Agustus 2017).

diselesaikan hanya dengan mengharapkan hasil kerja dari NGO, diperlukan keikutsertaan korban kekerasan dalam kerangka kerja NGO. Interaksi antara NGO dengan korban merupakan langkah yang efektif untuk membuat upaya ini bekerja.³⁹

Melalui lima studi pustaka yang peneliti jadikan sebagai sumber referensi kepustakaan di atas, peneliti menemukan beberapa aspek yang memiliki keterkaitan serta dianggap mampu untuk memberikan kontribusi bagi penelitian ini, diantaranya adalah: 1) Terdapat penjelasan mengenai kondisi ekonomi, politik dan sosial perempuan Dalit yang disertai dengan data-data resmi dari pemerintah dan badan survey nasional. Data-data ini memberikan informasi yang jelas bagi penelitian ini terutama mengenai situasi sedang yang dihadapi perempuan Dalit pada level domestik, 2) Tersedianya analisis mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Dalit untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Melalui analisis ini, peneliti memperoleh informasi mengenai sejarah keterlibatan masyarakat Dalit dalam diskursus politik domestik maupun internasional yang selanjutnya dalam penelitian digunakan sebagai titik berangkat untuk mengetahui seberapa jauh keterlibatan masyarakat Dalit dalam ruang publik, dan 3) Adanya contoh mengenai kerangka kerja berbagai organisasi non-pemerintah lokal maupun internasional terkait permasalahan kemanusiaan yang polanya bisa dijadikan referensi untuk mengkaji upaya IMADR untuk menyuarakan isu diskriminasi yang dialami oleh perempuan Dalit.

³⁹ *Ibid.*

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *Non-Governmental Organizations (NGOs)*

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada kerangka kerja *Non-Governmental Organizations (NGOs)* untuk menjelaskan upaya IMADR dalam menyuarakan isu diskriminasi kasta dan gender terhadap perempuan Dalit di India. Menurut definisi dari PBB, NGO merupakan organisasi non-profit dan *voluntary* yang terorganisir atas isu spesifik seperti lingkungan, kesehatan dan HAM pada level lokal, nasional dan internasional yang bergerak melakukan berbagai pelayanan dan fungsi kemanusiaan dengan menyalurkan kekhawatiran masyarakat kepada pemerintah, memonitor kebijakan dan mendorong partisipasi politik di tingkat masyarakat dengan menyediakan analisis dan keahlian sebagai mekanisme peringatan dini serta membantu memonitor penerapan perjanjian internasional suatu negara.⁴⁰

Sejak tahun 1960-an, NGO mengalami perkembangan yang pesat pada level global dan sejalan dengan hal ini NGO dipandang sebagai aktor penting dalam hubungan dan politik internasional dikarenakan peran dan posisinya yang penting dalam masyarakat.⁴¹ Peran tradisional NGO seperti penyediaan bantuan dalam hal bencana alam dan kelaparan serta pembangunan sosial dan ekonomi terus berkembang menempati posisi yang penting dalam aktivitas transnasional. Dalam beberapa tahun terakhir, peranan tersebut meluas ke arah peran politik seperti advokasi (termasuk lobi), penyusunan agenda, pendidikan publik, memonitor kesepakatan internasional dan berinteraksi dengan organisasi antar-

⁴⁰ Definition of NGOs, <http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html>, (diakses pada 13 November 2017).

⁴¹ Suharko, "NGO, Civil Society dan Demokrasi: Kritik atas Pandangan Liberal", dalam Betry Agrisa, "Strategi Migrant Care Dalam Mengadvokasi Buruh Migran Perempuan Indonesia di Malaysia (Studi Kasus: Wilfrida Soik)", (Bachelor Thesis, Universitas Andalas, 2016), 19.

pemerintah yang secara otomatis juga meningkatkan kesempatan bagi sektor *voluntary* untuk mempengaruhi politik internasional.⁴²

1.7.2 *Human Rights* NGOs

Dikarenakan IMADR merupakan sebuah NGO yang bergerak dalam ranah Hak Asasi Manusia (HAM), peneliti mempersempit konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini, yakni terfokus pada bagaimana NGO khususnya yang berfokus pada perjuangan HAM (Human Rights NGO) melakukan aktivitasnya pada level global. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah NGO yang fokus dalam mengatasi permasalahan pelanggaran HAM berkembang dengan sangat cepat. Organisasi-organisasi ini beroperasi dalam ruang lingkup internasional melalui kerjasama yang dibangun dengan pemerintah, pemimpin gerakan sosial, aktivis, pendonor dan individu. Pertumbuhan INGO dalam ranah HAM dilatarbelakangi oleh beberapa faktor: Pertama, sejak pertengahan abad ke-20, NGO telah mengekspresikan kekecewaan atas campur tangan pemerintah terhadap permasalahan sosial. Pada beberapa kasus, ketidakpuasan tersebut dihubungkan dengan apa yang disebut oleh pembuat kebijakan dan ilmuwan sosial sebagai kegagalan pemerintah. Sebagai respon dari kegagalan pemerintah, organisasi merasa bertanggung jawab untuk mengambil alih arena-arena yang tidak berhasil diatasi oleh negara.⁴³

Kedua, kegagalan ekonomi di negara-negara berkembang juga melatarbelakangi pencarian cara baru untuk mencapai pembangunan sosial.

⁴² Shamima Ahmed dan David Potter, *NGOs in International Politics*, (Bloomfield, CT: Kumarian Press, Inc., 2006), 37.

⁴³ Ahmed dan Potter, *NGOs in International Politics*, dalam Elizabeth M. Graffeo, "Evaluating Human Rights INGOs", (Master Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, 2010), 2.

Program-program pemerintah dunia ketiga dianggap telah gagal dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, sehingga level ekonomi di kebanyakan negara berkembang hanya berjalan di tempat dalam tiga dekade terakhir.⁴⁴ Faktor terakhir yang melatarbelakangi maraknya pertumbuhan NGO adalah terpenuhinya kebutuhan pokok kelompok tertentu dalam masyarakat yang “menciptakan peningkatan nilai pada masyarakat kelas menengah, dimana nilai yang pada awalnya hanya ditekankan pada stabilitas ekonomi dan materiil meningkat menjadi kepedulian akan kesetaraan sosial dan kualitas hidup”.

Munculnya nilai-nilai pos material ini di seluruh dunia memunculkan kekhawatiran baru dalam masyarakat seperti dalam hal HAM, pelestarian lingkungan dan dorongan untuk memberdayakan masyarakat. NGOs disini berperan dalam menangani semua permasalahan yang ada.⁴⁵ Dengan meningkatnya kegagalan pemerintah dalam mengatasi permasalahan warga negaranya, perekonomian di negara-negara berkembang berjalan di tempat, dan meluasnya kesadaran dari masyarakat kelas menengah, NGOs tumbuh sebagai sebuah instrumen, arena dan aktor untuk ikut andil dalam mengatasi kegagalan Negara.

Claude E. Welch Jr dalam *NGOs and Human Rights: Promise and Performance* mengidentifikasi beberapa upaya yang dilakukan NGO pada level PBB dalam kaitannya dengan permasalahan HAM, diantaranya adalah: *standard setting, providing information, lobbying* dan *providing assistance*.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*, 3.

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ Claude E. Welch Jr., *NGOs and Human Rights: Promise and Performance*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2001), 3.

1. *Standard Setting*

Area penting pertama dalam aktivitas NGO HAM adalah menetapkan standar bagi hak asasi manusia, area yang dalam istilah tradisional kedaulatan, menjadi milik pemerintah secara khusus. Upaya tersebut sulit untuk dilakukan, terutama dikarenakan penyusunan perjanjian didasarkan pada mufakat yang dicapai secara bersama. Negosiasi internasional melibatkan *give-and-take*, kompromi dibutuhkan untuk menyatukan kepentingan negara-negara yang sangat bervariasi. Dalam hal ini, NGO berupaya untuk menyediakan keahlian legal dan teknis sekaligus memobilisasi opini publik. NGO ikut andil dalam membentuk norma internasional bagi tingkah laku negara, tercantum dalam perjanjian yang mengikat secara hukum yang sebelumnya telah dinegosiasikan dan diratifikasi oleh pemerintah. NGO berpartisipasi dalam penyusunan standar baru bagi tindakan yang akan diambil oleh negara. Pada awalnya, NGO bertindak sebagai ahli, memperlakukan isu sebagai permasalahan teknis dan bukan politis. Peran ini kemudian meningkat dan menjadi lebih politis saat NGO memperoleh legitimasi, membentuk opini publik internasional, dan membangun koalisi dengan pemerintah yang simpatik dengan isu yang diangkat oleh NGO. Melalui peningkatan kerjasama, isu HAM kemudian dapat diperkenalkan dan diadopsi pada penyusunan perjanjian dalam konferensi internasional.⁴⁷

2. *Providing Information*

Upaya selanjutnya yang menjadi fokus NGO HAM adalah mengumpulkan informasi mengenai pelanggaran HAM, melakukan verifikasi dan pada akhirnya

⁴⁷ *Ibid*, 3-5.

meyebarkan atau menyiarkan informasi ke publik. NGO mempersiapkan dan menyediakan informasi mengenai kekerasan maupun perlakuan tidak menyenangkan lainnya berdasarkan *research* yang dilakukan sebelumnya. Tanpa adanya arus informasi, dokumentasi dan data dari NGO, seluruh sistem penerapan HAM dalam badan PBB akan berhenti. NGO memerankan fungsi yang kritis dalam mekanisme PBB, khususnya dalam mendapatkan dan memverifikasi informasi mengenai pelanggaran HAM. Seiring dengan perkembangannya, NGO telah banyak berkontribusi dalam menyediakan informasi yang terpercaya dan dapat diandalkan.⁴⁸

3. Lobbying

NGO melakukan lobi untuk membangun koalisi dengan organisasi lain dan negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama dengan yang diperjuangkan oleh NGO, dengan tujuan untuk menciptakan kerjasama. Lobi dilakukan sebagai upaya untuk mendorong ratifikasi konvensi yang berkaitan dengan HAM dan memantau kinerja negara yang telah meratifikasi konvensi. Untuk sampai pada tahap ini, organisasi nonpemerintah awalnya ikut andil dalam kampanye publik. Sebagai contohnya, upaya untuk menghapuskan apartheid, untuk mempublikasi dibatasinya kebebasan untuk berekspresi di Eropa Timur ataupun untuk mendemonstrasikan maraknya penganiayaan dan bagaimana hal ini dianggap lazim. Seluruhnya merupakan subjek utama dari kampanye-kampanye yang dipimpin oleh NGO. NGO melakukan lobi untuk menunjukkan bagaimana aksi yang dilakukan pemerintah dalam batas negaranya—dimana seharusnya diterapkan kendali atas kedaulatan—menimbulkan ancaman baik secara internasional maupun

⁴⁸ *Ibid* 5.

secara internal. Informasi yang dikumpulkan, diverifikasi dan disebarakan oleh INGO merupakan senjata utama dalam melobi pemerintah untuk merubah kebijakan.⁴⁹

4. *Providing assistance*

Melakukan publikasi terkait pelanggaran-pelanggaran HAM tidak cukup, diperlukan pertolongan yang ditujukan untuk para korban. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh NGO yang bergerak dalam bidang HAM adalah menawarkan bantuan legal terhadap orang-orang yang miskin dan tertekan. Dalam skala yang lebih besar, organisasi non pemerintah yang fokus pada pemberian bantuan dan pembangunan semakin menyadari bahwa pemberian bantuan darurat sederhana harus dilengkapi dengan upaya-upaya konkret untuk merubah kebijakan pemerintah yang melanggar HAM.⁵⁰

Melalui kerangka konseptual yang telah dijabarkan di atas, dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis upaya yang dilakukan IMADR sebagai NGO HAM atau Human Rights NGO dalam menyuarakan isu diskriminasi kasta dan gender yang dialami oleh perempuan Dalit di India dengan berfokus pada kerangka kerja NGO HAM pada level PBB.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplor dan memahami makna yang bagi individu maupun kelompok dianggap sebagai

⁴⁹ *Ibid*, 6.

⁵⁰ *Ibid*.

penyebab dari permasalahan sosial atau kemanusiaan.⁵¹ Metode penelitian kualitatif bersandar pada teks dan data gambar dan memiliki langkah-langkah khusus dalam menganalisis data. Proses dalam penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna dari data yang telah kita dapatkan.⁵²

Berdasarkan tujuannya, penelitian kualitatif menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis, dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji fenomena yang diangkat menjadi lebih rinci.⁵³ Dengan menggunakan metode dan jenis penelitian ini, peneliti mencoba untuk menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan IMADR dalam menyuarakan isu diskriminasi kasta dan gender yang terjadi pada perempuan Dalit di India. Kemudian melalui penggunaan tipe penelitian deskriptif analisis, diharapkan peneliti mampu untuk menyampaikan serta menjawab permasalahan yang diteliti secara lebih konkret dan lengkap.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada upaya yang dilakukan oleh IMADR dalam menyuarakan isu diskriminasi kasta dan gender terhadap perempuan Dalit di India dengan berfokus kepada langkah-langkah yang diambil IMADR untuk menyuarakan isu ini ke dalam kerangka kerja PBB. Selain membatasi ruang lingkup, peneliti juga membatasi tahun penelitian, yakni dimulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Tahun 2008

⁵¹ John W. Cresswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4th Edition* (California, SAGE Publications: 2013), 4.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Iskandar, *Metodologi Penelitian dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Gaung Persamda Press, 2008), 186.

merupakan awal mula IMADR ikut andil dalam upaya pengangkatan permasalahan perempuan Dalit ke ranah internasional. Sementara pembatasan sampai tahun 2018 didasari oleh ketersediaan data mengenai upaya paling terkini yang dilakukan oleh IMADR pada saat peneliti melakukan penelitian ini. Dengan membatasi penelitian, diharapkan penelitian ini dapat disajikan secara lebih rinci dan spesifik.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, diperlukan adanya sasaran dan tingkat analisis yang jelas, dimana peneliti harus terlebih dahulu menentukan variabel mana yang harus dijadikan sebagai unit analisis dan unit eksplanasi dalam penelitian ini. Unit analisis atau yang juga disebut dengan “variabel dependen” merupakan unit yang perilakunya hendak kita deskripsikan, jelaskan dan ramalkan. Sedangkan unit eksplanasi atau “variabel independen” merupakan unit yang dampaknya terhadap unit analisis hendak kita amati.⁵⁴

Selanjutnya, penentuan tingkat analisis diperlukan untuk mengidentifikasi pada level mana unit-unit di atas dijelaskan. Mohtar Mas’oed mengelompokkan lima kemungkinan tingkat analisis, yakni: 1) individu, 2) kelompok individu, 3) negara-bangsa, 4) kelompok negara-negara dalam satu region, dan 5) sistem global.⁵⁵ Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah IMADR, sedangkan unit eksplanasinya adalah PBB. Selain itu, tingkat analisis dalam penelitian ini adalah sistem global.

⁵⁴ Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta, LP3ES: 1990), 39.

⁵⁵ *Ibid*, 45–46.

1.8.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memanfaatkan sumber data primer dan sekunder yang tersedia terkait dengan topik yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Data primer peneliti kumpulkan melalui situs resmi IMADR dalam www.imadr.org yang berisikan laporan resmi maupun pernyataan yang dikeluarkan organisasi ini dalam upayanya menyuarakan isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan Dalit pada level internasional. Selain itu, peneliti juga memperoleh data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dokumen, artikel dan berita online.

Teknik pengumpulan data menurut pendapat John Dewey merupakan proses mengumpulkan bahan-bahan, informasi-informasi, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian.⁵⁶ Dalam penelitian ini, peneliti teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi kepustakaan. Koentjaraningrat mendefinisikan teknik kepustakaan sebagai suatu cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, misalnya majalah-majalah, catatan-catatan, koran, dokumen, kisah sejarah dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian.⁵⁷ Dengan mencari, mengumpulkan dan mengobservasi sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap penelitian ini berdasarkan konsep yang dijabarkan di atas.

⁵⁶ John Dewey dalam H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial/H. Hadari Nawawi*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press: 1991).

⁵⁷ Koentjaraningrat, "Metode-Metode Penelitian Masyarakat" dalam Anita Rahmawati, "Tinjauan Historis Agresi Militer I di Sumatera Timur Tahun 1947", (Skripsi Strata-1, Universitas Lampung: 2014), 24, <http://digilib.unila.ac.id/4154/16/BAB%20III.pdf>, (diakses pada 25 Oktober 2017).

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan.⁵⁸ Miles dan Huberman menjabarkan tahapan-tahapan dalam proses analisis data kualitatif, diantaranya meliputi⁵⁹:

1. Reduksi Data, merupakan sebuah proses merangkum, memilih hal-hal pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang tajam, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data sampai akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti memilah informasi yang bersumber dari laporan, jurnal, berita, artikel maupun website yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Melalui sumber tersebut, peneliti memilah data berdasarkan *keyword* yang sudah ditentukan dalam penelitian ini, diantaranya IMADR, perempuan Dalit, PBB, India serta NGO HAM. Melalui proses ini, peneliti memperoleh data dan informasi untuk dijadikan sumber literatur dalam penelitian ini.

⁵⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D" dalam M. Jahari, "Masuknya Agama Islam di Teluk Betung dan Pola Pengembangan Ajaran Agama Islam di Teluk Betung", (Skripsi Strata-1, Universitas Lampung: 2013), 18, <http://digilib.unila.ac.id/916/10/BAB%203.pdf>, (diakses pada 25 Oktober 2017).

⁵⁹ Miles dan Huberman dalam Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", dalam Anita Rahmawati, "Tinjauan Historis Agresi Militer I di Sumatera Timur Tahun 1947", (Skripsi Strata-1, Universitas Lampung: 2014), 26, <http://digilib.unila.ac.id/4154/16/BAB%20III.pdf>, (diakses pada 25 Oktober 2017).

2. Penyajian data, dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, sebagian besar data peneliti sajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, terutama penjelasan yang berkaitan dengan perkembangan isu diskriminasi kasta dan gender terhadap perempuan Dalit, serta sejarah keterlibatan IMADR dan PBB terkait isu tersebut. Selain dalam bentuk teks, peneliti juga menyajikan data statistik terkait diskriminasi perempuan Dalit dalam beberapa sektor dalam bentuk tabel. Di samping itu, peneliti juga menggunakan tabel untuk menyajikan data mengenai upaya keterlibatan IMADR dalam menyuarkan diskriminasi kasta dan gender terhadap perempuan Dalit berdasarkan urutan waktu.

3. Verifikasi, atau proses penarikan kesimpulan secara utuh setelah semua makna-makna yang muncul dari data yang dikumpulkan sudah diuji kebenarannya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya. Pada tahap ini, peneliti memverifikasi apakah data yang sudah peneliti kumpulkan dan sajikan dapat dipastikan kebenarannya melalui sumber lain yang mendukung kebenaran data. Daftar pustaka yang peneliti sajikan berdasarkan berbagai sumber terpercaya dalam penelitian ini merupakan cara untuk memverifikasi kebenaran data.

Data dalam penelitian ini akan dianalisis melalui proses-proses di atas sehingga peneliti mampu untuk menyajikan, menjelaskan serta menjawab pertanyaan penelitian dengan valid.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PERKEMBANGAN ISU DISKRIMINASI KASTA DAN GENDER DI PBB

Bab ini menjelaskan secara lebih menyeluruh mengenai perkembangan isu diskriminasi kasta dan gender di PBB. Pemaparan dimulai dari permasalahan diskriminasi kasta dan gender terhadap perempuan Dalit di India, lalu dilanjutkan dengan menjabarkan dinamika isu ini di PBB serta bagaimana PBB melakukan pendekatan terhadap permasalahan tersebut.

BAB III INTERNATIONAL MOVEMENT AGAINST ALL FORMS OF DISCRIMINATION AND RACISM (IMADR)

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai IMADR sebagai organisasi non-pemerintah yang fokus pada perjuangan hak-hak minoritas, status IMADR di PBB, serta keterkaitan organisasi ini dengan isu diskriminasi Dalit di India.

BAB IV ANALISIS UPAYA IMADR DALAM MENYUARAKAN ISU DISKRIMINASI KASTA DAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN DALIT INDIA DI PBB

Merupakan bab yang menjelaskan hasil analisis atas data-data temuan mengenai upaya yang dilakukan oleh IMADR dalam menyuarakan isu diskriminasi kasta

dan gender terhadap perempuan Dalit India di PBB menggunakan konsep *Human Rights* NGO atau NGO HAM yang sudah dijelaskan pada BAB I.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini.

